



IKU

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BAPPEDA-LITBANG TAHUN 2025-2029**



**BAPPEDA-LITBANG
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

2026



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
(BAPPEDA-LITBANG)

Jl. Affan Bachsin, Telpon/Fax. (0739) 21475

Website : bappeda.bengkuluselatankab.go.id, email : bappeda@bengkuluselatankab.go.id, Manna

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA LITBANG
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 09 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN 2025 - 2029

KEPALA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu ditetapkan indikator kinerja utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Bappeda Litbang tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025 - 2029.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

- Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 4 tahun 2025 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025 Nomor 4).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Tahun 2025-2029.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manna

Pada tanggal : 09 Januari 2026



Fikri Aljauhari, S.STP., M.M.
NIP 19821001200112 002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat karunia-Nya Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan dapat menyelesaikan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan dokumen ini berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis pada masing-masing tingkat secara berjenjang. Penyusunan Indikator Kinerja Utama Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan ini berguna sebagai acuan untuk kegiatan 1) Perencanaan Tahunan; 2) Perencanaan Anggaran; 3) Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja; 4) Pengukuran Kinerja; 5) Pelaporan Akuntabilitas Kinerja; 6) Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah; dan 7) Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan serta sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam upaya membangun Manajemen Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil (*outcome*), yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Sudah barang tentu penyusunan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) ini belum sempurna, untuk itu saran dan masukan demi perbaikan/penyempurnaan kami harapkan dari semua pihak. Semoga Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja dan bahan pelaksanaan kegiatan yang ada pada Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan.

Manna, 09 Januari 2026
Kepala Bappeda Litbang
Kabupaten Bengkulu Selatan

Fikri Aljauhari, S.STP., M.M.
Pembina Tk.I

NIP 198210012002121002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pemerintah yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu cita cita yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah maupun bagi masyarakat. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu wujud nyata niat pemerintah untuk memerangi korupsi baik secara represif maupun preventif. Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara sporadis/parsial, namun membutuhkan suatu pola komprehensif dan sistematis. Penanganan tindak korupsi secara sistematis ini antara lain dilakukan dari segi preventif melalui perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas.

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip *Good Governance* atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan tingkat ketercapaian sasaran atau kegiatan, yang selanjutnya dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah.

Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama melibatkan pemangku kepentingan di lingkungan lembaga / Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator.

Kinerja Utama. Sehingga dengan disusunnya Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan ini, diharapkan indikator kinerja dan target capaian kinerja dapat terukur dan dicapai sehingga terwujudnya "*Good Governance*".

1.2. Struktur Organisasi Bappeda Litbang

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan Lembaga Penunjang yang mempunyai tugas fungsi melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Perencanaan serta bidang Penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Kabupaten.

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Badan dilengkapi dengan 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang, yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Kepala Badan

- Tugas Pokok

Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan dan bidang Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan kabupaten.

- Fungsi

- Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) badan sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
- Perumusan, pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- Pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi;
- Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan bidang Penelitian dan Pengembangan;
- Pelaksanaan administrasi kedinasan di lingkungan badan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan bidang Perencanaan dan bidang Penelitian dan Pengembangan;
- Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
- Pembinaan kelompok jabatan fungsional perencana di lingkungan badan; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

b. Sekretariat

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi Badan, meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, umum dan kepegawaian, serta keuangan dan barang milik daerah, membantu Kepala Badan mengkoordinasikan seluruh Bidang. Dikepalai oleh seorang Sekretaris dengan dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- Tugas Pokok

Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di lingkungan badan.

- Fungsi

- Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sekretariat;
- Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Sekretariat;
- Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana program dan kegiatan serta anggaran di bidang Perencanaan dan bidang Penelitian dan Pengembangan;
- Pengelolaan data dan informasi di bidang Perencanaan dan bidang Penelitian dan Pengembangan;
- Koordinasi dan pelaksanaan kerjasama di bidang Perencanaan dan bidang Penelitian dan Pengembangan;
- Pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintahan yang meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan dan dokumentasi badan;
- Pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan badan;
- Pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan badan;
- Koordinasi pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan badan;
- Pengelolaan barang milik daerah di lingkungan badan;
- Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi serta hubungan masyarakat di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- Penyusunan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, terdiri dari:

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

3. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.

c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, meliputi Perencanaan dan Pendanaan, Data dan Informasi, serta Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan. Dikepalai oleh seorang Kepala Bidang dengan dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

• Tugas Pokok

Melaksanakan analisa dan pengkajian, penyusunan, pengintegrasian, harmonisasi, sinkronisasi, pengkoordinasian, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

• Fungsi

- Penyusunan rencana pelaksanaan tugas di Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- Pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- Pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;
- Pelaksanaan pengumpulan dan analisa data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- Perumusan kebijakan, penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- Pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- Pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- Pelaksanaan identifikasi permasalahan pembangunan daerah;
- Penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- Pengelolaan hasil analisis dan hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;

- Penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

Kepala Bidang membawahi 3 (tiga) Sub Bidang terdiri dari :

1. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
2. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi;
3. Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, meliputi penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan pembangunan pemerintahan Daerah aspek pemerintahan, pendidikan, agama dan kebudayaan, serta kesehatan, kependudukan dan ketenagakerjaan. Dikepalai oleh seorang Kepala Bidang dengan dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- Tugas Pokok

Melaksanakan penyusunan bahan perumusan, pengkoordinasian dan pembinaan serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.

- Fungsi

- Penyusunan rencana pelaksanaan tugas di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Pengkajian, pengkoordinasian, dan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- Pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan rencana pembangunan daerah secara holistik integratif di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- Pengkoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- Pengkoordinasian dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- Pengkoordinasian, sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan perangkat daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- Pengevaluasian, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

Kepala Bidang membawahi 3 (tiga) sub bidang, sebagai berikut :

1. Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I;
2. Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II;
3. Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III.

e. Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan ekonomi, meliputi pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, koperasi dan usaha kecil menengah dan penanaman modal, perindustrian, perdagangan, dan pariwisata. Dikepalai oleh seorang Kepala Bidang dengan dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

• Tugas Pokok

Melaksanakan penyusunan bahan perumusan, pengkoordinasian dan pembinaan serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dan kebijakan di bidang perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur.

• Fungsi

- Penyusunan rencana pelaksanaan tugas di Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur;
- Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur;
- Pengkajian, pengkoordinasian, dan perumusan kebijakan di bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur;
- Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah di bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur;
- Pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan rencana pembangunan daerah secara holistik integratif di bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur;
- Pengkoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan daerah di bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur;
- Pengkoordinasian dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah di bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur;

- Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur;
- Pengkoordinasian, sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan perangkat daerah di bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur;
- Pengevaluasian, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

Kepala Bidang membawahi 3 (tiga) sub bidang, sebagai berikut :

1. Kepala Sub Bidang Perekonomian;
2. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam;
3. Kepala Sub Bidang Infrastruktur.

f. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Dikepalai oleh seorang Kepala Bidang dengan dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- Tugas Pokok

Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Fungsi

- Penyusunan rencana pelaksanaan tugas di Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- Penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah;
- Penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah;
- Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan daerah;
- Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah;
- Fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di daerah;
- Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan daerah;
- Pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah;
- Pengevaluasian, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan

- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

Kepala Bidang membawahi 3 (tiga) sub bidang, sebagai berikut :

1. Kepala Sub Bidang Sosial Dan Pemerintahan;
2. Kepala Sub Bidang Ekonomi Dan Pembangunan;
3. Kepala Sub Bidang Inovasi Dan Teknologi.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Melakukan tugas menyelenggarakan sebagian tugas Badan di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

1.3. Tujuan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penyusunan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyusun Indikator Kinerja Utama setiap sasaran RPJMD/RPD yang kemudian diharapkan dapat ditetapkan dalam Peraturan Bupati karena IKU merupakan suatu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi dimana indikator yang paling menentukan (Strategis) bagi kelangsungan hidup organisasi. Sedangkan tujuan dari ditetapkannya Indikator Kinerja Utama bagi setiap instansi pemerintah adalah:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan secara formal dapat digunakan dalam:

1. Perencanaan Jangka Menengah.
2. Perencanaan Tahunan
3. Perencanaan Anggaran
4. Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja.
5. Pengukuran Kinerja.
6. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja.
7. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan-Kegiatan.

BAB II

INDIKATOR KINERJA UTAMA

2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bappeda Litbang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025 – 2029 telah memperhatikan target Indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN tahun 2025-2029, sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan sampai dengan tahun 2045, hasil evaluasi capaian kinerja daerah RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2021-2026. Isu-isu strategi, kebijakan nasional dan regulasi yang berlaku. Demikian pula dalam penentuan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029 yaitu **“Membangun Kabupaten Bengkulu Selatan yang Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan”** dengan Misi 1) Mewujudkan pembangunan desa dan kota yang setara melalui pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi; 2) Mendorong diversifikasi ekonomi melalui penguatan sektor pertanian, industri kreatif, dan pariwisata dalam meningkatkan daya saing daerah; 3) Menyediakan layanan dasar yang terjangkau dan berkualitas untuk membentuk sumber daya manusia dan lingkungan masyarakat yang unggul dan inklusif; 4) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, transparan, dan akuntabel dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam kebijakan pembangunan. Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan menyelaraskan tujuan sasaran Perangkat Daerah dengan Misi RPJMD yaitu Misi 4 (keempat) yaitu **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, transparan, dan akuntabel dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam kebijakan pembangunan”**. Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut, Dadan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan merumuskan Renstra lima tahun kedepan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
- b. Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- c. Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan bidang Perekonomian dan SDA
- d. Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan bidang Infrastruktur
- e. Meningkatnya capaian kapasitas Riset dan Inovasi Daerah.

2.2. Indikator Kinerja Utama

Didalam penerapan sistem AKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam

Sistem AKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya.

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan kuantitatif dan kualitatif dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPD dan Renstra organisasi perangkat daerah. Indikator kinerja utama pada unit organisasi setingkat eselon II / OPD / unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (*output*) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

Indikator Kinerja Utama Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu “Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah”. Indikator kinerja utama ini didukung melalui 4 (empat) program prioritas yaitu Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Penelitian dan Pengembangan Daerah serta Program Riset dan Inovasi Daerah.

Setelah menetapkan Indikator Kinerja Utama setiap instansi pemerintah diharuskan pula untuk menetapkan penjelasan/perhitungan yang hendak dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia. Dengan demikian, sesuai amanat PERMENPAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 dan PERMENPAN Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis. Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan guna mewujudkan ukuran keberhasilan berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi dan dapat dilihat dalam Lampiran Indikator Kinerja Utama.

BAB III

PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2029 dan Renstra masing- masing unit kerja. Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan ini pada hakekatnya merupakan indikator yang paling menentukan (strategis) bagi kelangsungan hidup suatu organisasi dan indikatot kinerja yang dipilih dari sekian banyak indikator kinerja yang dimiliki organisasi. Dengan penyusunan dokumen IKU Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan ini diharapkan dapat mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1) Perencanaan Tahunan
- 2) Perencanaan Anggaran
- 3) Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja.
- 4) Pengukuran Kinerja.
- 5) Pelaporan Akuntabilitas Kinerja.
- 6) Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah.
- 7) Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan- Kegiatan.

Semoga dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Buleleng ini bisa digunakan sebagai parameter dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta kinerja Dinas yang mendukung tercapainya target IKU.

Kepala Bappeda Litbang
Kabupaten Bengkulu Selatan



Fikri Aljauhari, S.STP, MM.
Pembina Tk.1 (IV/b)

NIP.19821001 200112 1 002

LAMPIRAN

BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAAN IKU

BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS
BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAPPEDA LITBANG
KABUPATEN BEENGKULU SELATAN TAHUN 2025-2029

Pada hari ini selasa tanggal dua puluh enam agustus tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di ruang zoom Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan telah diselenggarakan verifikasi Rancangan Rencana Strategis Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029 yang dihadiri oleh :

1. Kabid. Penelitian dan Pengembangan Bappeda Litbang
2. Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan

Serta dilakukan pembahasan terhadap :

1. Rancangan Rencana Strategis Bidang Penelitian dan Pengembangan Tahun 2025-2029;
2. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).

Peserta Verifikasi rancangan rencana Strategis Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Litbang Tahun 2025-2029,

Menyepakati,

- Kesatu : Rancangan Rencana Strategis Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Litbang Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran berita acara ini
- Kedua : Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output;
- Ketiga : Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kabid. Litbang Bappeda Litbang
Kabupaten Bengkulu Selatan


Budi Syahputra, S.KM., M.Si.
NIP 197705241997021001

Manna, 26 Agustus 2025
Perencana Ahli Muda


Zumeilda Sari, S.E., M.E.
NIP 197506272002122004

Kepala Bappeda Litbang
Kabupaten Bengkulu Selatan



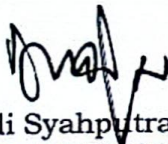
Pili Aljauhari, S.TP., M.M.
NIP 198210012001121002

Lampiran Berita Acara
Hasil Kesepakatan Rancangan Rencana Strategis
Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Litbang Tahun 2025-2029

Hasil Verifikasi Rancangan Rencana Strategis Bidang Penelitian dan Pengembangan
Bappeda Litbang Tahun 2025-2029 :

1. Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output;
2. Program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada numenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutahirannya;
3. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator yang yang disajikan merupakan indekator terseleksi;
4. Penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.

Kabid. Litbang Bappeda Litbang
Kabupaten Bengkulu Selatan



Budi Syahputra, S.KM., M.Si.
NIP 197705241997021001

Manna, 26 Agustus 2025
Perencana Ahli Muda



Zumeilda Sari, S.E., M.E.
NIP 197506272002122004

Kepala Bappeda Litbang
Kabupaten Bengkulu Selatan



Rusi Aliauhari, STP., M.M.
NIP 198210042001121002

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
ESELON III KEPALA BIDANG LITBANG**

No	Program dan Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Penjelasan / Formula/ Penghitungan	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja						Sumber Data	Penanggung Jawab
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbanga dalam perencanaan pembangunan	Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan	$\frac{\sum \text{Rekomendasi kebijakan yang dijadikan landasan}}{\sum \text{Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}} \times 100$	Persentase	0%	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%	Laporan Inovasi Bidang Litbang	Bidang Litbang
	Pengendalian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Penelitian Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dikembangkan	$\frac{\sum \text{Penelitian Bidang PPP yang dikembangkan}}{\sum \text{Penelitian Bid. Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan}} \times 100$	Persentase	6,67%	6,67%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	Kemendagri	Bidang Litbang
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Meningkatnya Kualitas Penelitian & Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penelitian Bidang Sosial dan Kependudukan yang dikembangkan	$\frac{\sum \text{Penelitian Bidang SosDuk yang dikembangkan}}{\sum \text{Penelitian Bidang Sosial dan Kependudukan}} \times 100$	Persentase	9,96%	9,96%	20%	20%	20%	20%	20%	Laporan Kinerja Bidang itbang	Bidang Litbang
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penelitian Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dikembangkan	$\frac{\sum \text{Penelitian Bidang EkoBang yang dikembangkan}}{\sum \text{Penelitian Bidang Ekonomi dan Pembangunan}} \times 100$	Persentase	7,69%	7,69%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	Laporan Kinerja Bidang itbang	Bidang Litbang
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Meningkatnya Inovasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Indeks Inovasi Daerah	$\frac{\text{Capaian IGA tahun n} - \text{capaian IGA tahun lalu}}{\text{Capaian IGA tahun lalu}} \times 100$	Persentase	5,617%	5,62%	5,63%	5,64%	5,65%	5,66%	5,66%	Laporan Inovasi Bidang Litbang	Bidang Litbang
2	Program Riset dan Inovasi Daerah	Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan	$\frac{\sum \text{Inovasi yang dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan}}{\sum \text{Inovasi yang ditetapkan dalam 1 Tahun}} \times 100$	Persentase	50,00%	51,00%	52,00%	53,00%	54,00%	55,00%	55,00%	Laporan Inovasi Bidang Litbang	Bidang Litbang
	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan	Optimalnya penelitian, pengembangan, pengkajian dan pengembangan	Persentase pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan	$\frac{\sum \text{Pengkajian yang diterapkan}}{\sum \text{Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan dan Pengkajian}} \times 100$	Persentase	0%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	Laporan Kinerja Bidang itbang	Bidang Litbang

Inovasi dan Inovasi	Optimalnya Inovasi dan Inovasi Daerah	Persentase Pertumbuhan Inovasi setiap tahun	$\frac{\text{Jumlah Inovasi tahun n} - \text{Jumlah Inovasi tahun lalu}}{\text{Jumlah Inovasi tahun lalu}} \times 100$	Persentase	20,59%	21,00%	22,00%	23,00%	24,00%	25,00%	25,00%	Laporan Inovasi Bidang Litbang	Bidang Litbang
---------------------	---------------------------------------	---	--	------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------------------------------	----------------



Kabid. Penelitian dan Pengembangan
Bappeda-Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan

(Handwritten signature)
Budi Syahputra, S.K.M., M.Si.
NIP 19770524199021001

Manna, 26 Agustus 2025
Perencana Ahli Muda
Bappeda-Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan

(Handwritten signature)
Zumeilda Sari, S.E., M.E.
NIP 197506272002122004

BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS
BIDANG P2EPD BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN 2025-2029

Pada hari ini jum'at tanggal dua puluh sembilan agustus tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di ruang zoom Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan telah diselenggarakan verifikasi Rancangan Rencana Strategis Bidang P2EPD Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029 yang dihadiri oleh :

1. Kabid. P2EPD Bappeda Litbang
2. Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan

Serta dilakukan pembahasan terhadap :

1. Rancangan Rencana Strategis Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029;
2. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).

Peserta Verifikasi rancangan rencana Strategis Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Litbang Tahun 2025-2029,

Menyepakati,

- Kesatu : Rancangan Rencana Strategis Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Litbang Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran berita acara ini
- Kedua : Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output;
- Ketiga : Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kabid. P2EPD Bappeda Litbang
Kabupaten Bengkulu Selatan



Nusadian Esa Putra, S.T., M.E.T.
NIP 198307032009011005

Manna, 29 Agustus 2025
Perencana Ahli Muda



Zumeilda Sari, S.E., M.E.
NIP 197506272002122004

Kepala Bappeda Litbang
Kabupaten Bengkulu Selatan



Fikri Alauddin, S.STP., M.M.
NIP 198210012001121002

Lampiran Berita Acara
Hasil Kesepakatan Rancangan Rencana Strategis
Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Litbang Tahun 2025-2029

Hasil Verifikasi Rancangan Rencana Strategis Bidang Penelitian dan Pengembangan
Bappeda Litbang Tahun 2025-2029 :

1. Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output;
2. Program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada numenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutahirannya;
3. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator yang yang disajikan merupakan indekator terseleksi;
4. Penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.

Kabid. P2EPD Bappeda Litbang
Kabupaten Bengkulu Selatan



Nusadian Esa Putra, S.T., M.E.T.
NIP 198307032009011005

Manna, 29 Agustus 2025
Perencana Ahli Muda



Zumeilda Sari, S.E., M.E.
NIP 197506272002122004

Kepala Bappeda Litbang
Kabupaten Bengkulu Selatan



Fikri Al Hafidh, S.T.P., M.M.
NIP 198210012001121002

INDIKATOR KINERJA UTAMA
ESELON III KEPALA BIDANG PE2PD

NO	Program dan Kegiatan	Beban Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Satuan	Basis 2024	Target Kinerja					Sumber Data	Penanggung Jawab	
							2025	2026	2027	2028	2029			2030
A	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	$\frac{\sum \text{Program pada RKPD}}{\sum \text{Program pada RPJMD}} \times 100$	Persentase	n/a	100	100	100	100	100	100	sipd.kemendagri	Kabid P2EPD
			Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah	$\frac{\sum \text{Program pada Renstra PD}}{\sum \text{Program pada RPJMD}} \times 100$	Persentase	n/a	100	100	100	100	100	100	sipd.kemendagri	Kabid P2EPD
			Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	$\frac{\sum \text{Program Prioritas yang didukung program daerah}}{\sum \text{Program Prioritas Nasional}} \times 100$	Persentase	n/a	100	100	100	100	100	100	sipd.kemendagri	Kabid P2EPD
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Meningkatnya Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	$\frac{\sum \text{Pendanaan RKPD tahun n}}{\sum \text{Pendanaan RPJMD}} \times 100$	Persentase	91,39	94,00	94,30	94,50	94,75	95,00	95,00	sipd.kemendagri	Kabid P2EPD
2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Updating Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	$\frac{\sum \text{Data Perencanaan yang Update pada sipd}}{\sum \text{Data bidang Perencanaan Pembangunan}} \times 100$	Persentase	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100	100	sipd.kemendagri	Kabid P2EPD
3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pencapaian Indikator Kinerja Daerah	$\frac{\sum \text{Indikator kinerja daerah yang tercapai target}}{\sum \text{Indikator Kinerja Daerah}} \times 100$	Persentase	55,00	59,09	60,00	61,00	62,00	63,00	64,00	e-money sipda	Kabid P2EPD
4	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Optimalisasi implementasi SIPD di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase Implementasi SIPD di Bidang Pembangunan Daerah	$\frac{\sum \text{SOPD yang mengimplementasikan sipd}}{\sum \text{SOPD di kabupaten Bengkulu Selatan}} \times 100$	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	sipd.kemendagri	Kabid P2EPD



Kabid. P2EPD
Bappeda-Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan

Nusadian Esa Putra, S.T., M.E.T.
NIP 198307032009011005

Manna, 29 Agustus 2025
Perencana Ahli Muda
Bappeda-Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan

Zumeilda Sari, S.E., M.E.
NIP 197506272002122004

BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS
BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA BAPPEDA LITBANG
KABUPATEN BEENGKULU SELATAN TAHUN 2025-2029

Pada hari ini jum'at tanggal dua puluh sembilan agustus tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di ruang zoom Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan telah diselenggarakan verifikasi Rancangan Rencana Strategis Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029 yang dihadiri oleh :

1. Kabid. Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Litbang
2. Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan

Serta dilakukan pembahasan terhadap :

1. Rancangan Rencana Strategis Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tahun 2025-2029;
2. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).

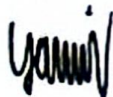
Peserta Verifikasi rancangan rencana Strategis Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Litbang Tahun 2025-2029,

Menyepakati,

- Kesatu : Rancangan Rencana Strategis Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Litbang Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran berita acara ini
- Kedua : Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output;
- Ketiga : Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kabid. PPM Bappeda Litbang
Kabupaten Bengkulu Selatan



Yemmi Fitriani, S.T., M.Si.
NIP 198201252009012009

Manna, 29 Agustus 2025
Perencana Ahli Muda



Zumeilda Sari, S.E., M.E.
NIP 197506272002122004

Kepala Bappeda Litbang
Kabupaten Bengkulu Selatan



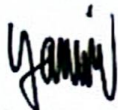
Fikri Almuhandis, S.TP., M.M.
NIP 1982010012001121002

Lampiran Berita Acara
Hasil Kesepakatan Rancangan Rencana Strategis
Bidang PPM Bappeda Litbang Tahun 2025-2029

Hasil Verifikasi Rancangan Rencana Strategis Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Litbang Tahun 2025-2029 :

1. Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output;
2. Program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada numenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutahirannya;
3. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator yang disajikan merupakan indekator terseleksi;
4. Penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.

Kabid. PPM Bappeda Litbang
Kabupaten Bengkulu Selatan



Yemmi Fitriani, S.T., M.Si.
NIP 198201252009012009

Manna, 29 Agustus 2025
Perencana Ahli Muda



Zumeilda Sari, S.E., M.E.
NIP 197506272002122004

Kepala Bappeda Litbang
Kabupaten Bengkulu Selatan



Fikri Aljauhari, S.T.P., M.M.
NIP 198210012001121002

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
ESELON III (KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA)**

KD	Program dan Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Satuan	Basis 2024	Target Kinerja					Sumber Data	Penanggung Jawab	
							2025	2026	2027	2028	2029			2030
A	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	$\frac{\sum \text{Program dan Kegiatan pada Renja PD}}{\sum \text{Program dan kegiatan pada RKPD}} \times 100$	Nilai	n/a	100	100	100	100	100	100	Matrik konsolidasi	Bidang PPM
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Optimalisasi kesesuaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada DokRen (RPJMD-RKPD, Renstra-Renja, Renja-RKA) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Konsistensi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Nilai Rata hasil Perhitungan tingkat Konsistensi Perencanaan Pembangunan Bengkulu Selatan ($\frac{\sum \text{Program RKPD Tahun N}}{\sum \text{Program RPJMD, } \sum \text{Kegiatan Renja tahun n}} / \frac{\sum \text{Kegiatan Renstra dan } \sum \text{Sub Kegiatan RKA tahun n}}{\sum \text{Sub Kegiatan Renja tahun n}}$)	Persentase	89,40%	89,50%	90,15%	90,40%	91,00%	92,00%	92,00%	Matrik konsolidasi	Bidang PPM



Kabid. Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Bappeda-Utbang Kabupaten Bengkulu Selatan

Yemmi
Yemmi Fitriani, S.T., M.Si
NIP 198201252009012009

Manna, 29 Agustus 2025
Perencana Ahli Muda
Bappeda-Utbang Kabupaten Bengkulu Selatan

Zumeilda
Zumeilda Sari, S.E., M.E.
NIP 197506272002122004

BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS
BIDANG PEREKONOMIAN, SDA, INFRASTRUKTUR BAPPEDA LITBANG
KABUPATEN BEENGKULU SELATAN TAHUN 2025-2029

Pada hari ini Jum'at tanggal dua puluh sembilan agustus tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di ruang zoom Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan telah diselenggarakan verifikasi Rancangan Rencana Strategis Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029 yang dihadiri oleh :

1. Kabid. PSI Bappeda Litbang
2. Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan

Serta dilakukan pembahasan terhadap :

1. Rancangan Rencana Strategis Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur Tahun 2025-2029;
2. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).

Peserta Verifikasi rancangan rencana Strategis Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Litbang Tahun 2025-2029,

Menyepakati,

- Kesatu : Rancangan Rencana Strategis Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur Bappeda Litbang Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran berita acara ini;
- Kedua : Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output;
- Ketiga : Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kabid. PSI Bappeda Litbang
Kabupaten Bengkulu Selatan



Dwi Prian Dona, S.T., M.E.
NIP 198506162010011014

Manna, 29 Agustus 2025
Perencana Ahli Muda



Zumeilda Sari, S.E., M.E.
NIP 197506272002122004

Kepala Bappeda Litbang
Kabupaten Bengkulu Selatan



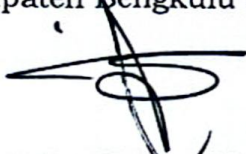
Fikri Aljathary, S.STP., M.M.
NIP 198210012001121002

Lampiran Berita Acara
Hasil Kesepakatan Rancangan Rencana Strategis
Bidang PSI Bappeda Litbang Tahun 2025-2029

Hasil Verifikasi Rancangan Rencana Strategis Bidang Perekonomian, SDA,
Infrastruktur Bappeda Litbang Tahun 2025-2029 :

1. Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output;
2. Program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada numenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutahirannya;
3. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator yang disajikan merupakan indekator terseleksi;
4. Penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.

Kabid. PSI Bappeda Litbang
Kabupaten Bengkulu Selatan



Dwi Prian Dona, S.T., M.E.
NIP 198506162010011014

Manna, 29 Agustus 2025
Perencana Ahli Muda



Zumeilda Sari, S.E., M.E.
NIP 197506272002122004

Kepala Bappeda Litbang
Kabupaten Bengkulu Selatan



Fikri Aljahary, S.SFP., M.M.
NIP 198210012001121002

INDIKATOR KINERJA MANAJEMEN
ESELON III KEPALA BIDANG PSI

RO	Program dan Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Penjelasan/ Formula/ Penghitungan	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja					Sumber Data	Penanggung Jawab	
							2025	2026	2027	2028	2029			2030
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur	$\frac{\sum \text{Program dan Kegiatan pada Renja PD}}{\sum \text{Program dan Kegiatan pada RKPDP}} \times 100$	Nilai	n/a	100	100	100	100	100	100	Matrik konsolidasi	Bidang PSI Bappeda - Litbang
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Optimalisasi kesesuaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan pada DokRen (RPJMD-RKPD, Renstra-Renja, Renja-RKA) Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase Konsistensi Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan pada Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Nilai Rata hasil Perhitungan tingkat Konsistensi Perencanaan Pembangunan Bengkulu Selatan $(\sum \text{Program RKPDP Tahun } N / \sum \text{Program RPJMD, } \sum \text{Kegiatan Renja tahun } n / \sum \text{Kegiatan Renstra dan } \sum \text{Sub Kegiatan RKA tahun } n / \sum \text{Sub Kegiatan Renja tahun } n)$	Persentase	86,85%	87,15%	88,40%	89,40%	90,15%	91,00%	91,00%	Matrik konsolidasi	Bidang PSI Bappeda - Litbang
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur	Optimalisasi kesesuaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan pada DokRen (RPJMD-RKPD, Renstra-Renja, Renja-RKA) Bidang Infrastruktur	Persentase Konsistensi Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan pada Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur	Nilai Rata hasil Perhitungan tingkat Konsistensi Perencanaan Pembangunan Bengkulu Selatan $(\sum \text{Program RKPDP Tahun } N / \sum \text{Program RPJMD, } \sum \text{Kegiatan Renja tahun } n / \sum \text{Kegiatan Renstra dan } \sum \text{Sub Kegiatan RKA tahun } n / \sum \text{Sub Kegiatan Renja tahun } n)$	Persentase	93,00%	93,85%	94,00%	94,35%	94,70%	95,00%	95,00%	Matrik konsolidasi	Bidang PSI Bappeda - Litbang



Kabid. Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan
Bappeda-Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan

Dwi Prian Dona, S.T., M.E.
NIP 198850616201001014

Manna, 29 Agustus 2025
Perencana Ahli Muda
Bappeda-Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan

Zumeilda Sari, S.E., M.E.
NIP 197506272002122004

MATRIK IKU

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
ESELON II (KEPALA PERANGKAT DAERAH)**

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran	Penjelasan/ Formulasi Penghitungan	Baseline	Target Kinerja						Sumber Data	Penanggung Jawab	
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah dengan dukungan tata kelola perangkat daerah yang akuntabel	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah			Jumlah Total Nilai dari Komponen Penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	84,92	90,00	90,50	91,00	91,50	92,00	92,00	Laporan Pengukuran IPPD	Bappeda Litbang	
				Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas	Persentase Sinergi Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah	$\frac{\sum \text{Nilai Komponen Sinergi Indeks PPD}}{\text{Bobot Nilai komponen sinergi Indeks PPD}} \times 100$	77,25%	85,00%	86,00%	87,50%	88,50%	90,00%	90,00%	Laporan Pengukuran IPPD	Bappeda Litbang
					Persentase Kualitas Perencanaan	$\frac{\sum \text{Nilai Komponen Kualitas Perencanaan Indeks PPD}}{\text{Bobot Nilai Komponen Kualitas Perencanaan Indeks PPD}} \times 100$	86,55%	87,50%	87,00%	88,00%	89,00%	90,00%	90,00%	Laporan Pengukuran IPPD	Bappeda Litbang
					Persentase Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja	$\frac{\sum \text{Nilai Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan perencanaan Kinerja Indeks PPD}}{\text{Bobot Nilai Komponen Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja Indeks PPD}} \times 100$	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Laporan Pengukuran IPPD	Bappeda Litbang
					Nilai Perencanaan Kinerja (SAKIP Daerah Komponen Perencanaan)	Hasil Penilaian Komponen SAKIP dari Kemenpan RB	22,12	25,00	25,00	25,50	26,00	26,50	27,00	LHE SAKIP Kemenpan RB	Bappeda Litbang
					Nilai Pengukuran Kinerja (SAKIP Daerah Komponen Pengukuran)	Hasil Penilaian Komponen SAKIP dari Kemenpan RB	15,65	23,00	23,00	23,50	24,00	24,50	25,00	LHE SAKIP Kemenpan RB	Bappeda Litbang
2					Persentase Hasil Riset	$\frac{\sum \text{Laporan Hasil Riset}}{\sum \text{Riset dan Penelitian}} \times 100$	n/a	5,71%	8,57%	8,57%	11,42%	14,28%	14,28%	Laporan Hasil Riset dan Inovasi	Bappeda Litbang
					Indeks Inovasi Daerah	Hasil Penilaian Indeks Inovasi oleh Kemendagri	54,34	62,27	62,5	63	63,5	64	65,01	IGA Kemendagri	Bappeda Litbang
3					Nilai AKIP Perangkat Daerah	Penilaian AKIP dari Inspektorat	62,05	76,00	76,10	76,30	76,50	76,70	77,00	LHE AKIP Inspektorat	Bappeda Litbang

Manna, 09 Januari 2026

KEPALA BAPPEDA LITBANG
KABUPATEN BENGKULU SELATAN



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
ESELON III (SEKRETARIS DAN KEPALA BIDANG)**

SEKRETARIS

NO	Program dan Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Penjelasan/ Formulasi Penghitungan	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja						Sumber Data	Penanggung Jawab
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akip Perangkat Daerah	Penilaian AKIP dari Inspektorat	Nilai	62,05	76,00	76,10	76,30	76,50	76,70	77,00	LHE AKIP	Sekretariat Bappeda Litbang
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Optimalnya ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	$\frac{\Sigma \text{Dokumen perencanaan yang tersedia}}{\Sigma \text{Dokumen perencanaan yang ditargetkan}} \times 100$	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	e-monev sipda	Sekretariat Bappeda Litbang
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Optimalnya ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	$\frac{\Sigma \text{Administrasi Keuangan yang tersedia}}{\Sigma \text{Administrasi Keuangan yang ditargetkan}} \times 100$	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	e-monev sipda	Sekretariat Bappeda Litbang
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Optimalnya ketersediaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	$\frac{\Sigma \text{Administrasi BMD yang tersedia}}{\Sigma \text{Administrasi BMD yang ditargetkan}} \times 100$	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	e-monev sipda	Sekretariat Bappeda Litbang
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Optimalnya ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	$\frac{\Sigma \text{Administrasi Kepegawaian yang tersedia}}{\Sigma \text{Adm. Kepegawaian yang ditargetkan}} \times 100$	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	e-monev sipda	Sekretariat Bappeda Litbang
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Optimalnya ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	$\frac{\Sigma \text{Administrasi Umum yang tersedia}}{\Sigma \text{Adm. administrasi Umum yang ditargetkan}} \times 100$	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	e-monev sipda	Sekretariat Bappeda Litbang
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalnya Pengadaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	$\frac{\Sigma \text{Pengadaan BMD yang terealisasi}}{\Sigma \text{Pengadaan BMD yang ditargetkan}} \times 100$	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	e-monev sipda	Sekretariat Bappeda Litbang
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	$\frac{\Sigma \text{Jasa Penunjang yang terealisasi}}{\Sigma \text{Jasa Penunjang yang ditargetkan}} \times 100$	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	e-monev sipda	Sekretariat Bappeda Litbang
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalnya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	$\frac{\Sigma \text{BMD yang dipelihara}}{\Sigma \text{BMD yang ditargetkan untuk dipelihara}} \times 100$	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	e-monev sipda	Sekretariat Bappeda Litbang

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
ESELON III KEPALA BIDANG PE2PD**

NO	Program dan Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja						Sumber Data	Penanggung Jawab
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
A	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPDP	$\frac{\sum \text{Program pada RKPDP}}{\sum \text{Program pada RPJMD}} \times 100$	Persentase	n/a	100	100	100	100	100	100	sipd.kemen dagri	Kabid P2EPD
			Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah	$\frac{\sum \text{Program pada Renstra PD}}{\sum \text{Program pada RPJMD}} \times 100$	Persentase	n/a	100	100	100	100	100	100	sipd.kemen dagri	Kabid P2EPD
			Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	$\frac{\sum \text{Program Prioritas yang didukung program daerah}}{\sum \text{Program Prioritas Nasional}} \times 100$	Persentase	n/a	100	100	100	100	100	100	sipd.kemen dagri	Kabid P2EPD
	1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Meningkatnya Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah $\frac{\sum \text{Pendanaan RKPDP tahun } n}{\sum \text{Pendanaan RPJMD}} \times 100$	Persentase	91,39	94,00	94,30	94,50	94,75	95,00	95,00	sipd.kemen dagri	Kabid P2EPD
	2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Updating Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah $\frac{\sum \text{Data Perencanaan yang Update pada sipd}}{\sum \text{Data bidang Perencanaan Pembangunan}} \times 100$	Persentase	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100	100	sipd.kemen dagri	Kabid P2EPD
	3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pencapaian Indikator Kinerja Daerah $\frac{\sum \text{Indikator kinerja daerah yang tercapai target}}{\sum \text{Indikator Kinerja Daerah}} \times 100$	Persentase	55,00	59,09	60,00	61,00	62,00	63,00	64,00	e-monev sipda	Kabid P2EPD
	4	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Optimalisasi Implementasi SIPD di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase Implementasi SIPD di Bidang Pembangunan Daerah $\frac{\sum \text{OPD yang mengimplementasikan sipd}}{\sum \text{OPD dikabupaten Bengkulu Selatan}} \times 100$	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	sipd.kemen dagri	Kabid P2EPD

INDIKATOR KINERJA UTAMA
ESELON III (KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA)

NO	Program dan Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Penjelasan/ Formulasi Penghitungan	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja						Sumber Data	Penanggung Jawab
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
A	Program kordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	$\frac{\sum \text{Program dan Kegiatan pada Renja PD}}{\sum \text{Program dan kegiatan pada RKPD}} \times 100$	Nilai	n/a	100	100	100	100	100	100	Matrik konsolidasi	Bidang PPM
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Optimalisasi kesesuaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada DokRen (RPJMD-RKPD, Renstra-Renja, Renja-RKA) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Konsistensi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	<p>Nilai Rata hasil Perhitungan tingkat Konsistensi Perencanaan Pembangunan Bengkulu Selatan</p> $\left(\frac{\sum \text{Program RKPD Tahun N}}{\sum \text{Program RPJMD}} \right) \times \left(\frac{\sum \text{Kegiatan Renja tahun n}}{\sum \text{Kegiatan Renstra dan } \sum \text{Sub Kegiatan RKA tahun n}} \right) \times 100$	Persentase	89,40%	89,50%	90,15%	90,40%	91,00%	92,00%	92,00%	Matrik konsolidasi	Bidang PPM

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
ESELON III KEPALA BIDANG PSI**

NO	Program dan Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja						Sumber Data	Penanggung Jawab
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Daerah Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur	$\frac{\sum \text{Program dan Kegiatan pada Renja PD}}{\sum \text{Program dan kegiatan pada RKPD}} \times 100$	Nilai	n/a	100	100	100	100	100	100	Matrik konsolidasi	Bidang PSI Bappeda - Litbang
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Optimalisasi kesesuaian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan pada DokRen (RPJMD-RKPD, Renstra-Renja, Renja-RKA) Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase Konsistensi Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan pada Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	<p>Nilai Rata hasil Perhitungan tingkat Konsistensi Perencanaan Pembangunan Bengkulu Selatan</p> $\left(\frac{\sum \text{Program RKPD Tahun N}}{\sum \text{Program RPJMD}} \right) \times \left(\frac{\sum \text{Kegiatan Renja tahun n}}{\sum \text{Kegiatan Renstra dan } \sum \text{Sub Kegiatan RKA tahun n}} \right) / \left(\frac{\sum \text{Sub Kegiatan Renja tahun n}}{\sum \text{Sub Kegiatan Renja tahun n}} \right)$	Persentase	86,85%	87,15%	88,40%	89,40%	90,15%	91,00%	91,00%	Matrik konsolidasi	Bidang PSI Bappeda - Litbang
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur	Optimalisasi kesesuaian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan pada DokRen (RPJMD-RKPD, Renstra-Renja, Renja-RKA) Bidang Infrastruktur	Persentase Konsistensi Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan pada Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur	<p>Nilai Rata hasil Perhitungan tingkat Konsistensi Perencanaan Pembangunan Bengkulu Selatan</p> $\left(\frac{\sum \text{Program RKPD Tahun N}}{\sum \text{Program RPJMD}} \right) \times \left(\frac{\sum \text{Kegiatan Renja tahun n}}{\sum \text{Kegiatan Renstra dan } \sum \text{Sub Kegiatan RKA tahun n}} \right) / \left(\frac{\sum \text{Sub Kegiatan Renja tahun n}}{\sum \text{Sub Kegiatan Renja tahun n}} \right)$	Persentase	93,00%	93,85%	94,00%	94,35%	94,70%	95,00%	95,00%	Matrik konsolidasi	Bidang PSI Bappeda - Litbang

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
ESELON III KEPALA BIDANG LITBANG**

NO	Program dan Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Satuan	Basis 2024	Target Kinerja						Sumber Data	Penanggung Jawab
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbang dalam perencanaan pembangunan	Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan	$\frac{\sum \text{Rekomendasi kebijakan yang dijadikan landasan}}{\sum \text{Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}} \times 100$	Persentase	0%	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%	Laporan Inovasi Bidang Litbang	Bidang Litbang
	Pengendalian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Penelitian Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dikembangkan	$\frac{\sum \text{Penelitian Bidang PPPP yang dikembangkan}}{\sum \text{Penelitian Bid. Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan}} \times 100$	Persentase	6,67%	6,67%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	Kemendagri	Bidang Litbang
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Meningkatnya Kualitas Penelitian & Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penelitian Bidang Sosial dan Kependudukan yang dikembangkan	$\frac{\sum \text{Penelitian Bidang SosDuk yang dikembangkan}}{\sum \text{Penelitian Bidang Sosial dan Kependudukan}} \times 100$	Persentase	9,96%	9,96%	20%	20%	20%	20%	20%	Laporan Kinerja Bidang itbang	Bidang Litbang
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penelitian Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dikembangkan	$\frac{\sum \text{Penelitian Bidang EkoBang yang dikembangkan}}{\sum \text{Penelitian Bidang Ekonomi dan Pembangunan}} \times 100$	Persentase	7,69%	7,69%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	Laporan Kinerja Bidang itbang	Bidang Litbang
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Meningkatnya Inovasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Indeks Inovasi Daerah	$\frac{\text{Capaian IGA tahun } n - \text{capaian IGA tahun lalu}}{\text{Capaian IGA tahun lalu}} \times 100$	Persentase	5,617%	5,62%	5,63%	5,64%	5,65%	5,66%	5,66%	Laporan Inovasi Bidang Litbang	Bidang Litbang
2	Program Riset dan Inovasi Daerah	Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan	$\frac{\sum \text{Inovasi yang dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan}}{\sum \text{Inovasi yang ditetapkan dalam 1 Tahun}} \times 100$	Persentase	50,00%	51,00%	52,00%	53,00%	54,00%	55,00%	55,00%	Laporan Inovasi Bidang Litbang	Bidang Litbang
	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan	Optimalnya pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan pengembangan	Persentase pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan	$\frac{\sum \text{Pengkajian yang diterapkan}}{\sum \text{Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan dan Pengkajian}} \times 100$	Persentase	0%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	Laporan Kinerja Bidang itbang	Bidang Litbang
	Invensi dan Inovasi	Optimalnya Invensi dan Inovasi Daerah	Persentase Pertumbuhan Inovasi setiap tahun	$\frac{\text{Jumlah Inovasi tahun } n - \text{Jumlah Inovasi tahun lalu}}{\text{Jumlah Inovasi tahun lalu}} \times 100$	Persentase	20,59%	21,00%	22,00%	23,00%	24,00%	25,00%	25,00%	Laporan Inovasi Bidang Litbang	Bidang Litbang

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT (ESELON IV)**

KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN (SEKRETARIAT)

NO	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja					Sumber Data	Penanggung Jawab
						2026	2027	2028	2029	2030		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	9	10	14	13	13	13	Sekretariat Bappeda Litbang	Sekretariat Bappeda Litbang
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	13	13	13	13	13	Sekretariat Bappeda Litbang	Sekretariat Bappeda Litbang
3	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Sekretariat Bappeda Litbang	Sekretariat Bappeda Litbang

KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN (SEKRETARIAT)

NO	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja					Sumber Data	Penanggung Jawab
						2026	2027	2028	2029	2030		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Orang/kali	671	672	672	672	672	672	Sekretaris Bappeda Litbang	Sekretaris Bappeda Litbang
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Dokumen	12	12	12	12	12	12	Sekretariat Bappeda Litbang	Sekretariat Bappeda Litbang
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	4	4	4	4	4	4	Sekretariat Bappeda Litbang	Sekretariat Bappeda Litbang
4	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	5	5	5	5	5	5	Sekretariat Bappeda Litbang	Sekretariat Bappeda Litbang

KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN (SEKRETARIAT)

NO	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja					Sumber Data	Penanggung Jawab
						2025	2026	2027	2028	2029		
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	0	2	2	2	2	2	Sekretariat Bappeda Litbang	Sekretariat Bappeda Litbang
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	12	12	12	12	12	Sekretariat Bappeda Litbang	Sekretariat Bappeda Litbang
3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	7	10	10	10	10	10	Sekretariat Bappeda Litbang	Sekretariat Bappeda Litbang
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	11	11	12	12	12	12	Sekretariat Bappeda Litbang	Sekretariat Bappeda Litbang
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	13	13	15	15	15	15	Sekretariat Bappeda Litbang	Sekretariat Bappeda Litbang
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	65	65	65	65	65	65	Sekretariat Bappeda Litbang	Sekretariat Bappeda Litbang
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10	10	10	10	10	10	Sekretariat Bappeda Litbang	Sekretariat Bappeda Litbang
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	10000	13900	13900	13900	13900	13900	Sekretariat Bappeda Litbang	Sekretariat Bappeda Litbang
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Laporan	67	70	70	70	72	72	Sekretariat Bappeda Litbang	Sekretariat Bappeda Litbang
10	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	8	1	1	1	1	1	Sekretariat Bappeda Litbang	Sekretariat Bappeda Litbang

11	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	0	1	1	1	1	1	Sekretariat Bappeda Litbang	Sekretariat Bappeda Litbang
12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	11	8	8	8	8	8	Sekretariat Bappeda Litbang	Sekretariat Bappeda Litbang
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	12	12	Sekretariat Bappeda Litbang	Sekretariat Bappeda Litbang
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Laporan	0	12	12	12	12	12	Sekretariat Bappeda Litbang	Sekretariat Bappeda Litbang
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Unit	23	23	23	23	23	23	Sekretariat Bappeda Litbang	Sekretariat Bappeda Litbang
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Unit	2	2	2	2	2	2	Sekretariat Bappeda Litbang	Sekretariat Bappeda Litbang
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	32	36	36	36	36	36	Sekretariat Bappeda Litbang	Sekretariat Bappeda Litbang

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 BIDANG P2EPD (ESELON IV) DISETARAKAN**

Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

NO	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja					Sumber Data	Penanggung Jawab
						2026	2027	2028	2029	2030		
1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	0	1	1	1	1	1	Bidang P2EPD	Bidang P2EPD
2	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	1	1	1	1	1	1	Bidang P2EPD	Bidang P2EPD
3	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	1	1	1	1			Bidang P2EPD	Bidang P2EPD
4	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dokumen	3	2	2	3	2	2	Bidang P2EPD	Bidang P2EPD

Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja					Sumber Data	Penanggung Jawab
						2026	2027	2028	2029	2030		
1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan pembangunan Daerah)	Dokumen	0	1	1	1	1	1	Bidang P2EPD	Bidang P2EPD
2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Terbinanya Sumber Daya Manusia OPD dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	250	250	250	250	250	250	Bidang P2EPD	Bidang P2EPD
3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	Buku	1	1	1	1	1	1	Bidang P2EPD	Bidang P2EPD

Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja					Sumber Data	Penanggung Jawab
						2026	2027	2028	2029	2030		
1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	4	4	4	4	4	4	Bidang P2EPD	Bidang P2EPD
2	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Terkendalinya Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan	Kerja Sama	0	1	1	1	1	1	Bidang P2EPD	Bidang P2EPD
3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	1	1	1	1	1	1	Bidang P2EPD	Bidang P2EPD

Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Pembangunan Daerah

NO	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Baseline 2023	Target Kinerja					Sumber Data	Penanggung Jawab
						2026	2027	2028	2029	2030		
1	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang dikelola	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Bidang P2EPD	Bidang P2EPD
2	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Terlaksananya Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen	0	1	1	1	1	1	Bidang P2EPD	Bidang P2EPD
3	Pembinaan Sistem Infotmasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Kabupaten	Terlaksananya Pembinaan Sistem Infotmasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Infotmasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	1	1	1	1	1	Bidang P2EPD	Bidang P2EPD

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BIDANG PPM (ESELON IV) DISETARAKAN**

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

NO	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja					Sumber Data	Penanggung Jawab
						2025	2026	2027	2028	2029		
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	19	19	19	19	19	19	Bidang PPM	Bidang PPM
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	19	19	19	19	19	19	Bidang PPM	Bidang PPM
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	19	19	19	19	19	19	Bidang PPM	Bidang PPM
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	19	19	19	19	19	19	Bidang PPM	Bidang PPM
5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	8	8	8	8	8	8	Bidang PPM	Bidang PPM
6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	8	8	8	8	8	8	Bidang PPM	Bidang PPM
7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	8	8	8	8	8	8	Bidang PPM	Bidang PPM
8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	8	8	8	8	8	8	Bidang PPM	Bidang PPM

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BIDANG PSI (ESELON IV) DISETARAKAN**

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA

NO	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja					Sumber Data	Penanggung Jawab
						2026	2027	2028	2029	2030		
1.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD & RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	5	5	5	5	5	5	Bidang PSI	Bidang PSI
2.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	5	5	5	5	5	5	Bidang PSI	Bidang PSI
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	5	5	5	5	5	5	Bidang PSI	Bidang PSI
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	5	5	5	5	5	5	Bidang PSI	Bidang PSI
5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	5	5	5	5	5	5	Bidang PSI	Bidang PSI
6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	5	5	5	5	5	5	Bidang PSI	Bidang PSI

7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	5	5	5	5	5	5	Bidang PSI	Bidang PSI
8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	5	5	5	5	5	5	Bidang PSI	Bidang PSI

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur

NO	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja					Sumber Data	Penanggung Jawab
						2026	2027	2028	2029	2030		
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Dokumen	4	4	4	4	4	4	Bidang PSI	Bidang PSI
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	4	4	4	4	4	4	Bidang PSI	Bidang PSI
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	4	4	4	4	4	4	Bidang PSI	Bidang PSI
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	4	4	4	4	4	4	Bidang PSI	Bidang PSI

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BIDANG LITBANG (ESELON IV) DISETARAKAN**

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

NO	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja					Sumber Data	Penanggung Jawab
						2026	2027	2028	2029	2030		
1	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Terkelolanya Data Kelitbangan dan Peraturan dengan baik	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan	1	1	1	1	1	1	Bidang Litbang	Bidang Litbang

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan

NO	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja					Sumber Data	Penanggung Jawab
						2026	2027	2028	2029	2030		
1	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dokumen	0	1	1	1			Bidang Litbang	Bidang Litbang
2	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen	1	1	1	1			Bidang Litbang	Bidang Litbang
3	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Dokumen	1	1	1	1			Bidang Litbang	Bidang Litbang

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

NO	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja					Sumber Data	Penanggung Jawab
						2026	2027	2028	2029	2030		
1	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Bidang Litbang	Bidang Litbang
2	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Dokumen	0	1	1	1	1	1	Bidang Litbang	Bidang Litbang
3	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Dokumen	0	1	1	1	1	1	Bidang Litbang	Bidang Litbang
4	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen	0	1	1	1	1	1	Bidang Litbang	Bidang Litbang

Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi

NO	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja					Sumber Data	Penanggung Jawab
						2026	2027	2028	2029	2030		
1	Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Bidang Litbang	Bidang Litbang
2	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan	0	1	1	1	1	1	Bidang Litbang	Bidang Litbang
3	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Terlaksananya Fasilitasi Hak Kekayaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan	1	1	1	1	1	1	Bidang Litbang	Bidang Litbang

Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan

NO	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja					Sumber Data	Penanggung Jawab
						2026	2027	2028	2029	2030		
1	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Laporan	0	1	1	1	1	1	Bidang Litbang	Bidang Litbang
2	Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Terlaksananya koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah untuk menghasilkan dokumen Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Dokumen	0	1	1	1	1	1	Bidang Litbang	Bidang Litbang

Kegiatan Invensi dan Inovasi

NO	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja					Sumber Data	Penanggung Jawab
						2026	2027	2028	2029	2030		
1	Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	Kegiatan	0	1	1	1	1	1	Bidang Litbang	Bidang Litbang
2	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Laporan	0	1	1	1	1	1	Bidang Litbang	Bidang Litbang
3	Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	Laporan	0	1	1	1	1	1	Bidang Litbang	Bidang Litbang

DEFINISI OPERASIONAL

TUJUAN PERANGKAT DAERAH

INDIKATOR TUJUAN PERANGKAT DAERAH

TUJUAN PERANGKAT DAERAH 1

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah dengan dukungan tata kelola perangkat daerah yang akuntabel

TUJUAN : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah dengan dukungan tata kelola perangkat daerah yang akuntabel

IK TUJUAN : Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah

Definisi	Metode Penghitungan
<p>Indeks Perencanaan Pembangunan digunakan untuk mengukur kualitas Perencanaan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.</p> <p>Komponen utama dari penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan ini adalah :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sinergi;<ul style="list-style-type: none">- Keselarasan Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJMN- Keselarasan Dokumen RKPD dengan RKP- Kesesuaian Anggaran Daerah dalam kontribusinya terhadap Pembangunan Nasional di Daerah.2. Kualitas Perencanaan;<ul style="list-style-type: none">- Kesesuaian prioritas Daerah dengan isu- Kesesuaian Target dan sasaran dalam menyelesaikan prioritas daerah dan isu daerah.- Kesesuaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan untuk mencapai target dan sasaran- Inovasi Perencanaan Pembangunan3. Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dan Perencanaan Kinerja;<ul style="list-style-type: none">- Target dan sasaran pembangunan menjadi target dan sasaran kinerja Perangkat Terkait.	<p>Jumlah total Nilai dari Komponen Penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>Komponen Penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah adalah :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Penilaian Sinergi dengan Bobot = 32;2. Penilaian Kualitas Perencanaan dengan Bobot = 58; dan3. Penilaian Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dan Perencanaan Kinerja dengan Bobot = 10.
Unit Pelaksana	Sumber Data
Bidang P2EPD, Bidang PPM dan Bidang PSI	Laporan Tahunan Bappeda Litbang

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS

SASARAN STRATEGIS 1

Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas

SS 1.1 : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas

IKSS 1.1 : Persentase Sinergi Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah

Definisi

Sinergi adalah indikator untuk mengukur kerja sama antar unit pemerintahan, yaitu pemerintah dan daerah untuk saling mengisi dan melengkapi dalam upaya bersama membangun sebuah rencana agar pelaksanaan pelayanan dasar agar dapat mewujudkan tujuan bersama. Komponen penilaian dari sinergi terdiri dari:

- 1) Keselarasan Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJMN;
- 2) Keselarasan Dokumen RKPD dengan RKP; dan
- 3) Kesesuaian Anggaran Daerah dalam Kontribusinya terhadap PN di Daerah.

Metode Penghitungan

$$\frac{\sum \text{Nilai Komponen Sinergi Indeks PPD}}{\text{Bobot Nilai Komponen Sinergi Indeks PPD}} \times 100$$

Satuan : Persentase (%)

Unit Pelaksana

Bidang P2EPD

Sumber Data

Laporan Tahunan Bappeda Litbang

SS 1.2 : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas

IKSS 1.2 : Persentase Kualitas Perencanaan

Definisi

Kualitas Perencanaan adalah indikator untuk mengukur kualitas perencanaan dengan mempertimbangkan kesesuaian antara isu strategis - target - Program/Kegiatan/Proyek di RPJMD atau RKPD, dan tingkat inovasi dalam perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah. Komponen penilaian dari kualitas perencanaan terdiri atas:

- 1) Kesesuaian prioritas daerah dengan isu daerah;
- 2) Kesesuaian target dan sasaran dalam menyelesaikan prioritas daerah dan isu daerah;
- 3) Kesesuaian Program/Kegiatan/Proyek untuk mencapai target dan sasaran; dan
- 4) Inovasi perencanaan pembangunan.

Unit Pelaksana

Bidang PPM dan Bidang PSI

Metode Penghitungan

$$\frac{\Sigma \text{Nilai Komponen Kualitas Perencanaan Indeks PPD}}{\text{Bobot Nilai Komponen Kualitas Perencanaan Indeks PPD}} \times 100$$

Satuan : Persentase (%)

Sumber Data

Laporan Tahunan Bappeda Litbang

SS 1.3 : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas

IKSS 1.3 : Persentase Keterhubungan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Perencanaan Kinerja

Definisi

Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja adalah indikator untuk mengukur keterhubungan antara perencanaan kinerja instansi dengan substansi perencanaan pembangunan. Komponen dari indikator ini terdiri dari (satu) sub-komponen yaitu target dan sasaran pembangunan menjadi target dan sasaran kinerja lembaga terkait.

Metode Penghitungan

$$\frac{\sum \text{Nilai Komponen Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja Indeks PPD}}{\text{Bobot Nilai Komponen Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja Indeks PPD}} \times 100$$

Satuan : Persentase (%)

Unit Pelaksana

Bidang P2EPD

Sumber Data

Laporan Tahunan Bappeda Litbang

SS 1.4 : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas

IKSS 1.4 : Nilai Perencanaan Kinerja (SAKIP Daerah Komponen Perencanaan)

Definisi	Metode Penghitungan
<p>Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.</p> <p>Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.</p> <p>Penyusunan Rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.</p> <p>Nilai Perencanaan kinerja merupakan salah satu komponen dalam penilaian pada Evaluasi SAKIP.</p> <p>Pelaksanaan Evaluasi SAKIP berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.</p>	<p>Hasil Penilaian Komponen SAKIP dari Kemenpan RB</p> <p>Satuan : Nilai</p>
Unit Pelaksana	Sumber Data
Bidang P2EPD	Laporan Tahunan Bappeda Litbang

SS 1.4 : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas

IKSS 1.4 : Nilai Perencanaan Kinerja (SAKIP Daerah Komponen Pengukuran)

Definisi	Metode Penghitungan
<p>Pengukuran Kinerja adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja.</p> <p>Pengukuran Kinerja dilakukan pada seluruh level organisasi dan seluruh tingkatan jenjang jabatan</p> <p>Nilai Pengukuran kinerja merupakan salah satu komponen dalam penilaian pada Evaluasi SAKIP.</p> <p>Pelaksanaan Evaluasi SAKIP berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.</p>	<p>Hasil Penilaian Komponen SAKIP dari Kemenpan RB</p> <p>Satuan : Nilai</p>
Unit Pelaksana	Sumber Data
Bidang P2EPD	Laporan Tahunan Bappeda Litbang

SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya Peran Riset Dan Inovasi Dalam Mendukung Pembangunan Daerah

SS 1.1 : Meningkatnya Capaian Kapasitas Inovasi Daerah

IKSS 1.1 : Persentase Hasil Riset

Definisi

merupakan tujuan yang diarahkan untuk meningkatkan peran riset dan inovasi sebagai landasan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan daerah di Kabupaten Bengkulu Selatan. Sasaran ini menegaskan komitmen Bappeda Litbang untuk mengoptimalkan kegiatan penelitian yang relevan dengan kebutuhan pembangunan, memperkuat pemanfaatan hasil kajian sebagai rekomendasi kebijakan, serta mendorong penerapan inovasi dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Melalui pencapaian sasaran ini, diharapkan pembangunan daerah dapat berlangsung secara lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan berdasarkan bukti ilmiah dan solusi inovatif yang dapat meningkatkan kualitas dan daya saing daerah.

Metode Penghitungan

$$\frac{\sum \text{Laporan Hasil Riset}}{\sum \text{Riset dan Penelitian}} \times 100$$

Satuan : Angka

Unit Pelaksana

Bidang LITBANG

Sumber Data

Kemendagri

SS 1.2 : Meningkatnya Capaian Kapasitas Inovasi Daerah

IKSS 1.2 : Indeks Inovasi Daerah

Definisi	Metode Penghitungan
<p>Indeks Inovasi Daerah adalah system pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah.</p> <p>Indeks Inovasi terdiri dari 2 aspek, yaitu Aspek Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) dan Aspek Satuan Inovasi Daerah (SID).</p> <p><u>Aspek SPD</u> memuat 3 Variabel yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none">1) Variabel Institusi dengan indicator : Visi Misi, Tingkat Lembaga Kelitbangan, APBD Tepat Waktu, Kualitas Peningkatan Perizinan, Jumlah Pendapatan Peekapita, Tingkat Pengangguran Terbuka, Jumlah Peningkatan Investasi, Jumlah Peningkatan PAD, Opini BPK, Nilai Capaian SAKIP dan Penurunan Angka Kemiskinan;2) Variabel SDM dengan indicator : Nilai IPM dan Penghargaan bagi Inovator;3) Variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian dengan indicator : Jumlah Inovasi Daerah, Jumlah Penelitian atau kajian yang mendukung Inovasi dan Radmap SIDA. <p>Aspek SID memuat 5 Variabel dan 21 Indikator (seperti tertera pada parameter nilai kematangan inovasi diatas).</p>	<p>Hasil penilaian Indeks Inovasi oleh Kemendagri</p> <p>Satuan : Angka</p>
Unit Pelaksana	Sumber Data
Bidang LITBANG	Kemendagri

SASARAN STRATEGIS 3

Meningkatnya tata kelola perangkat daerah yang akuntabel

SS 1.1 : Meningkatkan tata kelola perangkat daerah yang akuntabel

IKSS 1.1 : Nilai AKIP Perangkat Daerah

Definisi

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan (rencana strategis dan perjanjian kinerja), pengukuran kinerja, pengelolaan kinerja, pelaporan kinerja, revidi dan evaluasi kinerja.

Evaluasi atas penerapan AKIP pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilakukan oleh Inspektorat. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*).

Unit Pelaksana

SEKRETARIAT

Metode Penghitungan

Penilaian AKIP dari Inspektorat

Satuan : Nilai

Sumber Data

LHE AKIP Inspektorat

SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

SASARAN PROGRAM 1

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

SP 1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

IKP 1.1 : Nilai AKIP Perangkat Daerah

Definisi

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan (rencana strategis dan perjanjian kinerja), pengukuran kinerja, pengelolaan kinerja, pelaporan kinerja, revaluasi dan evaluasi kinerja.

Evaluasi atas penerapan AKIP pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilakukan oleh Inspektorat. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*).

Unit Pelaksana

Bidang Sekretariat

Metode Penghitungan

Pelaksanaan Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Nilai AKIP = [Perencanaan Kinerja] + [Pengukuran kinerja] + [Pelaporan Kinerja] + [Evaluasi Kinerja]

Dari hasil nilai, akan dikategorikan pada Predikat Penilaian AKIP:

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang

Satuan: Predikat

Tipe penghitungan: Non Kumulatif

Sumber Data

Surat Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat (LEH AKIP)

SASARAN PROGRAM 2

Program Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah

SP 2. : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

IKP 2.1 : Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD

Definisi	Metode Penghitungan
<p>bertujuan meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah agar pelaksanaan pembangunan berjalan terarah, efisien, serta sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Melalui sasaran ini, pemerintah daerah memastikan setiap program dikembangkan dan dilaksanakan berdasarkan data, analisis yang akurat, serta mekanisme evaluasi yang dapat memberikan umpan balik bagi perbaikan kebijakan dan peningkatan efektivitas pembangunan.</p>	$\frac{\sum \text{Program pada RKPD}}{\sum \text{Program pada RPJMD}} \times 100$ <p>Satuan : Persentase</p>
Unit Pelaksana	Sumber Data
Bidang P2EPD	sipd.kemendagri

SP 2 : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

IKP 2.2 : Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah

Definisi	Metode Penghitungan
<p>Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kecocokan antara arah kebijakan, tujuan, sasaran, program, dan indikator kinerja dalam Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen RPJMD. Indikator ini menggambarkan sejauh mana Perangkat Daerah menyusun Renstra sesuai mandat, prioritas, dan target pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah daerah dalam RPJMD.</p>	$\frac{\sum \text{Program pada Renstra PD}}{\sum \text{Program pada RPJMD}} \times 100$ <p>Satuan : Persentase</p>
Unit Pelaksana	Sumber Data
Bidang P2EPD	sipd.kemendagri

SP 2 : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

IKP 2.3 : Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah

Definisi	Metode Penghitungan
<p>Persentase Program Prioritas Nasional yang Didukung Program Daerah adalah ukuran yang menggambarkan sejauh mana program pembangunan daerah selaras dan memberikan dukungan terhadap Program Prioritas Nasional sebagaimana ditetapkan pemerintah pusat. Indikator ini menilai tingkat keterkaitan dan kontribusi program daerah dalam mempercepat pencapaian target pembangunan nasional melalui integrasi kebijakan, sinergi perencanaan, dan pelaksanaan program di daerah.</p>	$\frac{\Sigma \text{Program Prioritas yang didukung program daerah}}{\Sigma \text{Program Prioritas Nasional}} \times 100$ <p>Satuan : Persentase</p>
Unit Pelaksana	Sumber Data
Bidang P2EPD	sipd.kemendagri

SASARAN PROGRAM 3

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

SP 3.1 : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

IKP 3.1 : Persentase keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Definisi

Kualitas Perencanaan adalah indikator untuk mengukur kualitas perencanaan dengan mempertimbangkan kesesuaian antara isu strategis - target - Program/Kegiatan/Proyek di RPJMD atau RKPD, dan tingkat inovasi dalam perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah. Komponen penilaian dari kualitas perencanaan terdiri atas:

- 1) Kesesuaian prioritas daerah dengan isu daerah;
- 2) Kesesuaian target dan sasaran dalam menyelesaikan prioritas daerah dan isu daerah;
- 3) Kesesuaian Program/Kegiatan/Proyek untuk mencapai target dan sasaran; dan
- 4) Inovasi perencanaan pembangunan.

Unit Pelaksana

Bidang PPM

Metode Penghitungan

$$\frac{\sum \text{Program dan Kegiatan pada Renja PD}}{\sum \text{Program dan kegiatan pada RKPD}} \times 100$$

Jumlah Nilai Kualitas Perencanaan pada Instrumen Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah.

Satuan : Nilai

Merujuk ke Instrumen Indeks Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah, Bobot Kualitas Perencanaan dengan perhitungan sbb :

Indikator	Bobot
Kesesuaian prioritas daerah dengan isu daerah	18
Kesesuaian target dan sasaran dalam menyelesaikan prioritas daerah dan isu daerah	14
Kesesuaian Program/Kegiatan/Proyek untuk mencapai target dan sasaran	17
Inovasi Perencanaan Pembangunan	9
Total →	58

Sumber Data

Matrik konsolidasi

SP 3.2 : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur

IKP 3.1 : Persentase keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur

Definisi

Kualitas Perencanaan adalah indikator untuk mengukur kualitas perencanaan dengan mempertimbangkan kesesuaian antara isu strategis - target - Program/Kegiatan/Proyek di RPJMD atau RKPD, dan tingkat inovasi dalam perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah. Komponen penilaian dari kualitas perencanaan terdiri atas:

- 1) Kesesuaian prioritas daerah dengan isu daerah;
- 2) Kesesuaian target dan sasaran dalam menyelesaikan prioritas daerah dan isu daerah;
- 3) Kesesuaian Program/Kegiatan/Proyek untuk mencapai target dan sasaran; dan
- 4) Inovasi perencanaan pembangunan.

Unit Pelaksana

Bidang PSI

Metode Penghitungan

$$\frac{\sum \text{Program dan Kegiatan pada Renja PD}}{\sum \text{Program dan kegiatan pada RKPD}} \times 100$$

Jumlah Nilai Kualitas Perencanaan pada Instrumen Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah.

Satuan : Nilai

Merujuk ke Instrumen Indeks Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah, Bobot Kualitas Perencanaan dengan perhitungan sbb :

Indikator	Bobot
Kesesuaian prioritas daerah dengan isu daerah	18
Kesesuaian target dan sasaran dalam menyelesaikan prioritas daerah dan isu daerah	14
Kesesuaian Program/Kegiatan/Proyek untuk mencapai target dan sasaran	17
Inovasi Perencanaan Pembangunan	9
Total →	58

Sumber Data

Matrik konsolidasi

SASARAN PROGRAM 4

Program Penelitian dan Pengembangan

SP 4 : Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan

IKP 4.1 : Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan

Definisi

Perencanaan Pembangunan merupakan proses dalam menetapkan suatu capaian yang terarah dengan adanya program dan sasaran, implementasi dan evaluasi. Dalam Perumusan Kebijakan Pembangunan diperlukan penelitian dan atau inovasi yang dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas rumusan kebijakan atau perencanaan Pembangunan.

Unit Pelaksana

Bidang LITBANG

Metode Penghitungan

$$\frac{\sum \text{Rekomendasi kebijakan yang dijadikan landasan}}{\sum \text{Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}} \times 100$$

Satuan : Persentase

Sumber Data

Laporan Inovasi Bidang LITBANG

SASARAN PROGRAM 5

Program Riset dan Inovasi Daerah

SP 5 : Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan

IKP 5.1 : Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan

Definisi

Pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan merujuk pada penerapan ide kreatif pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik, daya saing dan kesejahteraan masyarakat melalui Indek Inovasi Daerah (IID).

Metode Penghitungan

$\frac{\sum \text{Inovasi yang dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan}}{\sum \text{Inovasi yang ditetapkan dalam 1 Tahun}} \times 100$

Satuan : Persentase

Unit Pelaksana

Bidang LITBANG

Sumber Data

Laporan Inovasi Bidang LITBANG

SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

SASARAN 1

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

SK 1.1 : Optimalnya ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

IKK 1.1 : Persentase ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Definisi

Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah merupakan Pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan secara rinci dalam pelayanan kepada masyarakat agar terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan pembangunan dalam kurun waktu tertentu.

Renstra adalah Dokumen Perencanaan dalam kurun waktu 5 tahunan.

Renja adalah Dokumen Perencanaan dalam kurun waktu 1 tahunan.

Serta Dokumen lain yang merupakan bagian dari Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Dokumen Anggaran Perangkat Daerah merupakan Dokumen yang memuat Pendapatan dan Belanja setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah merupakan kegiatan rutin yang dilakukan, bertujuan untuk menilai kinerja dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Unit Pelaksana

Bidang Sekretariat

Metode Penghitungan

$$\frac{\sum \text{Dokumen perencanaan yang tersedia}}{\sum \text{Dokumen perencanaan yang ditargetkan}} \times 100$$

Satuan : Persentase

Sumber Data

E-Monev SIPDA

SASARAN 2

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

SK 2.1 : Optimalnya ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

IKK 2.1 : Persentase ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Definisi

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah adalah kegiatan yang berkenaan dengan pencatatan, penggolongan, pengolahan, penyimpanan, pengarsipan terhadap seluruh kekayaan Perangkat Daerah, termasuk didalamnya hak dan kewajiban yang timbul karenanya .

Administrasi Keuangan terdiri dari serangkaian langkah-langkah dimana dana-dana disediakan bagi pejabat-pejabat tertentu dibawah prosedur-prosedur yang akan menjamin sah dan berdaya gunanya pemakaian dana-dana itu. Bagian Utama ialah menyusun anggaran belanja, pembukuan, pemeriksaan pembukuan, pembelian dan persediaan.

Metode Penghitungan

$$\frac{\sum \text{Administrasi Keuangan yang tersedia}}{\sum \text{Administrasi Keuangan yang ditargetkan}} \times 100$$

Satuan : Persentase

Unit Pelaksana

Bidang Sekretariat

Sumber Data

E-Monev SIPDA

SASARAN 3

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

SK 3.1 : Optimalnya ketersediaan Administrasi BMD Perangkat Daerah

IKK 3.1 : Persentase ketersediaan Administrasi BMD Perangkat Daerah

Definisi	Metode Penghitungan
<p>Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua Barang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.</p> <p>Administrasi BMD Perangkat Daerah merupakan serangkaian Dokumen yang diperlukan dalam rangka pengelolaan Barang Daerah.</p> <p>Yang dimaksud dengan Pengelolaan Barang Daerah adalah suatu rangkaian kegiatan dan tindakan yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran2. Pengadaan3. Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran4. Penggunaan5. Penatausahaan6. Pemanfaatan7. Pengamanan dan Pemeliharaan8. Penilaian9. Penghapusan10. Pemindahtanganan11. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian12. Pembiayaan13. Tuntutan Ganti Rugi	$\frac{\sum \text{Administrasi BMD yang tersedia}}{\sum \text{Administrasi BMD yang ditargetkan}} \times 100$ <p>Satuan : Persentase</p>
Unit Pelaksana	Sumber Data
Bidang Sekretariat	E-Monev SIPDA

SASARAN 4

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

SK 4.1 : Optimalnya ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

IKK 4.1 : Persentase ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Definisi	Metode Penghitungan
<p>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tersedianya Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai2. Tersedianya Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan3. Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Adm Kepegawaian4. Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian5. Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai6. Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun7. Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang meninggal dalam melaksanakan Tugas8. Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN9. Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi10. Terlaksananya Sosialisasi Per-UU11. Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Per-uu.	$\frac{\Sigma \text{Administrasi Kepegawaian yang tersedia}}{\Sigma \text{Adm. Kepegawaian yang ditargetkan}} \times 100$ <p>Satuan : Persentase</p>
Unit Pelaksana	Sumber Data
Bidang Sekretariat	E-Monev SIPDA

SASARAN 5

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

SK 5.1 : Optimalnya ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah

IKK 5.1 : Persentase ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Definisi	Metode Penghitungan
<p>Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah semua aktivitas yang bersifat teknis ketatausahaan dari suatu Perangkat Daerah yang mempunyai peranan penting dalam pelayanan terhadap pelaksanaan pekerjaan operatif, penyediaan keterangan bagi pimpinan dan juga membantu dalam kelancaran perkembangan organisasi.</p> <p>Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 11 (sebelas) Sub Kegiatan, sbb :</p> <ol style="list-style-type: none">1)Penyediaan Komponen Listrik,2)Penyediaan Peralatan/Perlengkapan,3)Penyediaan Logistik, 4)Penyediaan Barang Cetak, 5)Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, 6)Penyediaan Bahan Bacaan, 7)Penyediaan Bahan/Material, 8)Fasilitasi Kunjunga Tamu, 9)Penyelenggaraan Rapat Koordinasi, 10)Penatausahaan arsip dinamis dan 11)Dukungan pelaksanaan SPBE	$\frac{\sum \text{Administrasi Umum yang tersedia}}{\sum \text{Adm.inistrasi Umum yang ditargetkan}} \times 100$ <p>Satuan : Persentase</p>
Unit Pelaksana	Sumber Data
Bidang Sekretariat	E-Monev SIPDA

SASARAN 6

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

SK 6.1 : Optimalnya Pengadaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah

IKK 6.1 : Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah

Definisi

Pengadaan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan Belanja Modal bagi Pemerintah yang pada saat bersamaan dapat menciptakan asset berupa asset tetap atau investasi.

Metode Penghitungan

$$\frac{\sum \text{Pengadaan BMD yang terealisasi}}{\sum \text{Pengadaan BMD yang ditargetkan}} \times 100$$

Satuan : Persentase

Unit Pelaksana

Bidang Sekretariat

Sumber Data

E-Monev SIPDA

SASARAN 7

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

SK 7.1 : Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

IKK 7.1 : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Definisi

Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah daerah merupakan aktivitas yang sangat menunjang kinerja dan aktivitas perkantoran secara efisien, diantaranya merupakan penyediaan jasa Listrik, jasa air dan jasa telekomunikasi.

Metode Penghitungan

$$\frac{\sum \text{Jasa Penunjang yang terealisasi}}{\sum \text{Jasa Penunjang yang ditargetkan}} \times 100$$

Satuan : Persentase

Unit Pelaksana

Bidang Sekretariat

Sumber Data

E-Monev SIPDA

SASARAN 8

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

SK 5.1 : Optimalnya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

IKK 5.1 : Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Definisi

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, yaitu agar tersedianya kebutuhan sarana dan Prasarana yang layak dan memadai, sehingga Pelayanan Administrasi Perkantoran terlaksana dengan efektif dan efisien.

Metode Penghitungan

$$\frac{\sum BMD \text{ yang dipelihara}}{\sum BMD \text{ yang ditargetkan untuk dipelihara}} \times 100$$

Satuan : Persentase

Unit Pelaksana

Bidang Sekretariat

Sumber Data

E-Monev SIPDA

SASARAN 9

Kegiatan Penyusunan, Perencanaan dan Pendanaan

SK 9.1 : Meningkatnya Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah

IKK 9.1 : Persentase Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah

Definisi

Merupakan aktivitas dan proses yang dilakukan sehingga tersedianya dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang meliputi Program, Kegiatan dan pendanaan beserta Indikator yang akan dicapai.

Metode Penghitungan

Nilai Rata hasil Perhitungan tingkat Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan Bengkulu Selatan
(\sum Program RKPD Tahun N / \sum Program RPJMD dan \sum Pendanaan RKPD tahun n / \sum Pendanaan RPJMD)

Satuan : Persentase

Unit Pelaksana

Bidang P2EPD

Sumber Data

SIPD.KEMENDAGRI

SASARAN 10

Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan

SK 10.1 : Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan

IKK 10.1 : Persentase Updating Data dan Informasi Pembangunan Daerah

Definisi

Analisis Data dan Informasi adalah Berupa Dokumen Analisis yang diperlukan untuk menyusun Kebijakan Perencanaan Pembangunan (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah).

Metode Penghitungan

$$\frac{\sum \text{Data Perencanaan yang update pada sipd}}{\sum \text{Data bidang Perencanaan Pembangunan}} \times 100$$

Satuan : Persen

Unit Pelaksana

Bidang P2EPD

Sumber Data

SIPD.KEMENDAGRI

SASARAN 11

Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan

SK 11.1 : Meningkatkan kualitas Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

IKK 11.1 : Persentase Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

Definisi	Metode Penghitungan
<p>Indikator Makro merupakan indikator gabungan dari berbagai kegiatan Pembangunan, Ekonomi dan Sosial. Indikator Makro Daerah tersebut merupakan Indikator Makro Pembangunan Daerah yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Indeks Pembangunan Manusia;2. Angka Kemiskinan;3. Angka Pengangguran;4. Pertumbuhan Ekonomi;5. Pendapatan Perkapita; dan6. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio).	$\frac{\sum \text{Indikator Makro Daerah yang tercapai target}}{\sum \text{Indikator Kerja Daerah}} \times 100$ <p>Satuan : Persentase</p>
Unit Pelaksana	Sumber Data
Bidang P2EPD	SIPD.KEMENDAGRI

SASARAN 12

Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah

SK 12.1 : Optimalisasi Implementasi SIPD di Bidang Pembangunan Daerah

IKK 12.1 : Persentase Implementasi SIPD di Bidang Pembangunan Daerah

Definisi

SIPD merupakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dapat menyediakan database secara elektronik dan program Satu Data Pemerintah.

Aplikasi SIPD focus kepada proses bisnis Pembangunan Daerah, Keuangan Daerah dan Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya.

Implementasi SIPD di Bidang Pembangunan Daerah meliputi :

1. Pengelolaan Data dalam SIPD di Bidang Pembangunan Daerah
2. Penerapan SIPD di Bidang Pembangunan Daerah
3. Pembinaan SPID di Bidang Pembangunan Daerah.

Metode Penghitungan

$$\frac{\sum OPD \text{ yang mengimplementasikan sipd}}{\sum OPD \text{ dikabupaten Bengkulu Selatan}} \times 100$$

Satuan : Persentase

Unit Pelaksana

Bidang P2EPD

Sumber Data

SIPD.KEMENDAGRI

SASARAN 13

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

SK 13.1 : Optimalisasi kesesuaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada DokRen (RPJMD-RKPD, Renstra-Renja, Renja-RKA) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

IKK 13.1 : Persentase Konsistensi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Definisi

Konsistensi Perencanaan dalam Program dan Kegiatan merupakan Proses keterpaduan dan Penguatan Penyusunan rencana

Penilaian Konsistensi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Dokumen Perencanaan dilakukan dengan menggunakan Matrik Konsolidasi Perencanaan pada :

1. Program Tahun n pada RPJMD dan RKPD
2. Kegiatan Tahun n pada Renstra dan Renja
3. Sub Kegiatan Tahun n pada Renja dan RKA.

Metode Penghitungan

Nilai Rata hasil Perhitungan tingkat Konsistensi Perencanaan Pembangunan Bengkulu Selatan

$(\sum \text{Program RKPD Tahun N} / \sum \text{Program RPJMD}, \sum \text{Kegiatan Renja tahun n} / \sum \text{Kegiatan Renstra dan } \sum \text{Sub Kegiatan RKA tahun n} / \sum \text{Sub Kegiatan Renja tahun n})$

Satuan : Persentase

Data diperoleh pada saat asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan bidang PPM (BA Verifikasi Dokumen Perencanaan)

Unit Pelaksana

Bidang PPM

Sumber Data

Matriks Konsolidasi

SASARAN 14

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

SK 14.1 : Optimalisasi kesesuaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada DokRen (RPJMD-RKPD, Renstra-Renja, Renja-RKA) Bidang Perekonomian dan SDA

IKK 14.1 : Persentase Konsistensi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA

Definisi

Konsistensi Perencanaan dalam Program dan Kegiatan merupakan Proses keterpaduan dan Penguatan Penyusunan rencana

Penilaian Konsistensi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Dokumen Perencanaan dilakukan dengan menggunakan Matrik Konsolidasi Perencanaan pada :

1. Program Tahun n pada RPJMD dan RKPD
2. Kegiatan Tahun n pada Renstra dan Renja
3. Sub Kegiatan Tahun n pada Renja dan RKA.

Metode Penghitungan

Nilai Rata hasil Perhitungan tingkat Konsistensi Perencanaan Pembangunan Bengkulu Selatan
(\sum Program RKPD Tahun N / \sum Program RPJMD, \sum Kegiatan Renja tahun n / \sum Kegiatan Renstra dan \sum Sub Kegiatan RKA tahun n / \sum Sub Kegiatan Renja tahun n)

Satuan : Persentase

Data diperoleh pada saat asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan bidang Perekonomian dan SDA (BA Verifikasi Dokumen Perencanaan)

Unit Pelaksana

Bidang PSI

Sumber Data

Matriks Konsolidasi

SASARAN 15

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur

SK 15.1 : Optimalisasi kesesuaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada DokRen (RPJMD-RKPD, Renstra-Renja, Renja-RKA) Bidang Infrastruktur

IKK 15.1 : Persentase Konsistensi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur

Definisi

Konsistensi Perencanaan dalam Program dan Kegiatan merupakan Proses keterpaduan dan Penguatan Penyusunan rencana

Penilaian Konsistensi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Dokumen Perencanaan dilakukan dengan menggunakan Matrik Konsolidasi Perencanaan pada :

1. Program Tahun n pada RPJMD dan RKPD
2. Kegiatan Tahun n pada Renstra dan Renja
3. Sub Kegiatan Tahun n pada Renja dan RKA.

Metode Penghitungan

Nilai Rata hasil Perhitungan tingkat Konsistensi Perencanaan Pembangunan Bengkulu Selatan

$(\sum \text{Program RKPD Tahun N} / \sum \text{Program RPJMD}, \sum \text{Kegiatan Renja tahun n} / \sum \text{Kegiatan Renstra dan } \sum \text{Sub Kegiatan RKA tahun n} / \sum \text{Sub Kegiatan Renja tahun n})$

Satuan : Persentase

Data diperoleh pada saat asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan bidang Infrastruktur (BA Verifikasi Dokumen Perencanaan)

Unit Pelaksana

Bidang PSI

Sumber Data

Matriks Konsolidasi

SASARAN 16

Kegiatan pengendalian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

SK 16.1 : Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

IKK 16.1 : Persentase Penelitian Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

Definisi

Penelitian Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan merupakan Serangkaian Kegiatan yang dilakukan untuk berinovasi di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.

Metode Penghitungan

$$\frac{\sum \text{Penelitian Bid. Pemerintahan yang dikembangkan}}{\sum \text{Penelitian Bidang Pemerintahan}} \times 100$$

0

Satuan : Persen

Unit Pelaksana

Bidang LITBANG

Sumber Data

KEMENDAGRI

SASARAN 17

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan

SK 17.1 : Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan

IKK 17.1 : Persentase Penelitian Bidang Sosial dan Kependudukan yang dikembangkan

Definisi

Penelitian Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan merupakan Serangkaian Kegiatan yang dilakukan untuk berinovasi di bidang Sosial dan Kependudukan.

Metode Penghitungan

$$\frac{\sum \text{Penelitian Bidang SosDuk yang dikembangkan}}{\sum \text{Penelitian Bidang Sosial dan Kependudukan}} \times 100$$

Satuan : Persentase

Unit Pelaksana

Bidang LITBANG

Sumber Data

Laporan Kinerja Bidang LITBANG

SASARAN 18

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

SK 18.1 : Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

IKK 18.1 : Persentase Penelitian Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dikembangkan

Definisi

Penelitian Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan merupakan Serangkaian Kegiatan yang dilakukan untuk berinovasi di bidang Ekonomi dan Pembangunan.

Metode Penghitungan

$$\frac{\sum \text{Penelitian Bidang EkoBang yang dikembangkan}}{\sum \text{Penelitian Bidang Ekonomi dan Pembangunan}} \times 100$$

Satuan : Persentase

Unit Pelaksana

Bidang LITBANG

Sumber Data

Laporan Kinerja Bidang LITBANG

SASARAN 19

Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi

SK 19.1 : Meningkatnya Inovasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah

IKK 19.1 : Persentase pertumbuhan Inovasi setiap tahun

Definisi

Pertumbuhan Inovasi merupakan Peningkatan Jumlah Inovasi yang diciptakan setiap tahun

Metode Penghitungan

$$\frac{\text{Jumlah Inovasi } n - \text{Jumlah Inovasi tahun lalu}}{\text{Jumlah Inovasi tahun lalu}} \times 100$$

Satuan : Persentase

Unit Pelaksana

Bidang LITBANG

Sumber Data

Laporan Inovasi Bidang LITBANG

SASARAN 20

Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan

SK 20.1 : Optimalnya pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan pengembangan

IKK 20.1 : Persentase pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan

Definisi

Optimalisasi pelaksanaan penelitian, pengembangan dan pengkajian bertujuan untuk memaksimalkan efisiensi, relevansi dan dampak hasil riset terhadap pembangunan nasional melalui ekosistem kolaboratif. Proses ini mencakup penguasaan sumber daya manusia riset, infrastruktur, pendana dan sinergi antar stakeholder seperti pemerintah, akademisi, industri serta masyarakat.

Unit Pelaksana

Bidang LITBANG

Metode Penghitungan

$$\frac{\sum \text{Pengkajian yang diterapkan}}{\sum \text{Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan dan Pengkajian}} \times 100$$

Satuan : Persentase

Sumber Data

Laporan Kinerja Bidang LITBANG

SASARAN 21

Kegiatan Inovasi dan Inovasi

SK 21.1 : Optimalnya Inovasi dan Inovasi Daerah

IKK 21.1 : Persentase Pertumbuhan Inovasi setiap tahun

Definisi

Pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan merujuk pada penerapan ide kreatif pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik, daya saing dan kesejahteraan masyarakat melalui Indek Inovasi Daerah (IID).

Memaksimalkan senergi antar penanam modal dengan ide kreatif lokal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, peningkatan daya saing dan memanfaatkan potensi unggulan daerah. Proses ini dilakukan melalui reformasi birokrasi, regulasi dan kolaborasi stakeholder agar realisasi investasi selaras dengan indeks inovasi daerah

Unit Pelaksana

Bidang LITBANG

Metode Penghitungan

$$\frac{\text{Jumlah Inovasi tahun } n - \text{Jumlah Inovasi tahun lalu}}{\text{Jumlah Inovasi tahun lalu}} \times 100$$

Satuan : Persentase

Sumber Data

Laporan Inovasi Bidang LITBANG